

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penetapan dan penegasan batas wilayah merupakan hal yang sangat penting dalam konteks administrasi suatu wilayah. Kejelasan batas wilayah diperlukan untuk menghindari potensi konflik dan memastikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Batas wilayah memiliki implikasi yang signifikan terhadap pengelolaan sumber daya alam, perencanaan pembangunan, dan keamanan wilayah. Namun, proses penetapan batas wilayah seringkali dihadapkan pada berbagai permasalahan seperti kurangnya informasi yang akurat tentang lokasi batas, perbedaan pandangan antara pihak-pihak yang terlibat, serta kendala teknis dan administratif lainnya. Ketidakjelasan batas wilayah dapat berpotensi memicu konflik antar wilayah yang berbatasan.

Pemerintah pusat merespons isu ini dengan merumuskan kebijakan yang relevan, salah satunya adalah penerapan "Satu Peta" berdasarkan Permendagri No. 45 Tahun 2016. Kebijakan ini memiliki tujuan untuk memastikan bahwa batas wilayah antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat ditentukan secara jelas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul akibat ketidakjelasan batas wilayah, seperti konflik antarwilayah, konflik masyarakat, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang tidak optimal. Kebijakan Satu Peta menekankan pentingnya koordinasi antar pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam penetapan batas wilayah. Kebijakan ini juga melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat setempat, dalam proses penetapan batas wilayah untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat setempat terpenuhi. Dalam pengimplementasian yang baik, kebijakan Satu Peta diharapkan dapat mengatasi masalah penetapan batas administrasi yang tidak jelas dan memastikan bahwa batas administrasi ditentukan dengan jelas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat (Silviana, 2019).

Batas administrasi adalah garis pemisah yang memisahkan antar wilayah, seperti kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan bahkan batas negara,

Devi Muhamad Ramdhan, 2023

PENETAPAN BATAS WILAYAH MENGGUNAKAN METODE KARTOMETRIK (STUDI KASUS DAERAH KELURAHAN PASIR KIDUL KECAMATAN PURWOKERTO BARAT, KABUPATEN BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH) Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

yang didasarkan pada kesepakatan kedaulatan lokasi territorial. Penggambaran batas ini didasarkan pada UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, yang menyatakan bahwa batas wilayah harus digambarkan pada peta dasar. Batas merupakan identifikasi hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan sosial masyarakat (adat) dengan wilayah yang berkaitan dengan adanya diferensiasi lingkungan. Batas wilayah suatu daerah sangat erat kaitannya dengan status hukum wilayah, dan setiap daerah memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang tentang pemerintahan daerah sejak diberlakukannya otonomi daerah (Siagian, 2018).

Otonomi daerah memegang peran penting dalam penetapan batas wilayah di Indonesia. Kegiatan penelitian penetapan batas desa perlu dilakukan dikarenakan terjadinya pasang surut otonomi daerah di Indonesia. Otonomi daerah terbentuk pada tahun 1903, namun hal ini menjadi tabu di sebagian daerah Indonesia, otonomi daerah ini seakan akan baru di kenali secara luas ketika terbentuknya UU no. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Otonomi daerah memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan satu peta di Indonesia. Otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah memiliki keleluasaan dan kewenangan dalam mengelola dan mengelola sumber daya yang ada di wilayah mereka. Oleh karena itu, pemerintah daerah dimungkinkan untuk bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam implementasi kebijakan Satu Peta untuk memastikan bahwa sumber daya alam dan lingkungan dikelola secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Otonomi daerah juga memungkinkan pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam penentuan batas wilayah dan pengelolaan sumber daya alam yang ada di wilayah mereka. Ini memastikan bahwa kebijakan Satu Peta diimplementasikan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat setempat dan memastikan bahwa kepentingan nasional terlindungi. Namun, peran otonomi daerah dalam implementasi kebijakan Satu Peta juga dapat menimbulkan masalah seperti perbedaan pandangan antar pemerintah daerah dan kurangnya koordinasi antar pemerintah daerah. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa

Devi Muhamad Ramdhan, 2023

PENETAPAN BATAS WILAYAH MENGGUNAKAN METODE KARTOMETRIK (STUDI KASUS DAERAH KELURAHAN PASIR KIDUL KECAMATAN PURWOKERTO BARAT, KABUPATEN BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH) Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

implementasi kebijakan Satu Peta dilakukan dengan cara yang bersifat nasional dan melibatkan berbagai pihak untuk memastikan kepentingan nasional terlindungi.

Berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur tentang pembentukan desa di Indonesia. Menurut pasal 8 ayat 2, pembentukan desa ditentukan melalui peraturan daerah kabupaten/kota, dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa. Batas wilayah desa juga ditentukan oleh daerah untuk mengatur keuangan dan aset daerah berdasarkan tingkat kemiskinan dan kesulitan geografis (UU No 6, 2014).

Menurut data Kementerian Dalam Negeri Indonesia mempunyai 979 segmen batas wilayah. Dari total keseluruhan segmen batas yang telah rampung dikerjakan yakni berjumlah 668 segmen batas atau 68% dari total keseluruhan, data ini di dapat sebelum terbitnya PP Nomor 43 tahun 2021 tentang penyelesaian ketidak sesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah. Namun Kemendagri melaporkan pada Maret 2022, sekitar 757 segmen batas telah ditetapkan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), sekitar 175 segmen batas daerah yang masih dalam proses penetapan Permendagri dan sisanya sebanyak 47 segmen batas masih dalam proses penyelesaian. Dalam rapat, disebutkan bahwa sebagian besar (78%) dari 979 segmen batas provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia sudah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri. Hampir semua (98%) batas provinsi di Pulau Jawa sudah ditetapkan secara pasti. Beberapa segmen batas masih dalam proses penyelesaian dan revisi, namun garis batas yang direkomendasikan Kemendagri akan menjadi acuan (Kemendagri, 2022)

Batas wilayah administrasi harus diterapkan dan sah secara hukum sebelum digunakan untuk proses administrasi, termasuk penataan ruang. Camat harus melakukan pengawasan dan pembinaan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai bagian dari pemerintah kabupaten atau kota. Dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab untuk memfasilitasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dengan mengeluarkan Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri

Devi Muhamad Ramdhan, 2023

PENETAPAN BATAS WILAYAH MENGGUNAKAN METODE KARTOMETRIK (STUDI KASUS DAERAH KELURAHAN PASIR KIDUL KECAMATAN PURWOKERTO BARAT, KABUPATEN BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH) Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Nomor 27 Tahun 2006. Tujuan dari penetapan dan penegasan batas desa adalah untuk menyediakan kepastian hukum bagi batas desa di wilayah darat. Permendagri No. 76 Tahun 2012 diterbitkannya sebagai pengganti Permendagri No. 1 Tahun 2006 mengatur bahwa penetapan dan penegasan batas daerah dilakukan secara kartometrik, sehingga kajian penerapan metode ini perlu dilakukan terhadap penetapan batas desa/kelurahan (Permendagri RI, 2012). Dalam penentuan batas desa berdasarkan Permendagri nomor 45 tahun 2016 yang berisikan batas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang bersifat yuridis. Dalam proses penentuan batas wilayah dilakukan dengan cara pelacakan pilar batas, batas wilayah ini menjadi peranan penting sebagai batas wilayah yuridiksi pemisah wilayah administrasi pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa (Permendagri RI, 2016).

Kelurahan Pasir Kidul adalah sebuah daerah yang warisan dari Kerajaan Pasir Luhur. Kerajaan Pasir Luhur terdiri dari tiga desa administratif dan satu administrasi kelurahan yang terbagi menjadi dua kecamatan, yaitu Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon, dan Desa Pasir Lor yang berada di Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, serta satu administrasi Kelurahan Pasir Kidul yang berada di Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah.

Pasir Kidul merupakan suatu wilayah yang perlu ditetapkan karena suatu faktor kepentingan administrasi suatu wilayah, menurut pemerintah daerah setempat yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kabupaten Banyumas menerangkan bahwa Kelurahan Pasir Kidul ini telah memiliki kesepakatan yang tertulis dan disepakati antar belah pihak yang tercantum di berita acara yang dibuatkan langsung oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) pada kesepakatan tahun 2021. Kesepakatan penetapan ini berupa penetapan titik-titik kartometrik berupa simpul 3 desa dan segmen yang berbatasan dengan 2 desa. Dalam hal ini kelurahan Pasir Kidul mempunyai batas yang telah terpetakan dan disepakati, segmen batas yang sudah disepakati ini secara langsung menetapkan batas wilayah administrasi antara Kecamatan Purwokerto Barat dan

Devi Muhamad Ramdhan, 2023

PENETAPAN BATAS WILAYAH MENGGUNAKAN METODE KARTOMETRIK (STUDI KASUS DAERAH KELURAHAN PASIR KIDUL KECAMATAN PURWOKERTO BARAT, KABUPATEN BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH) Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Kecamatan Karanglewas. Kecamatan Karanglewas ini ditempati oleh administrasi desa, batas wilayah yang telah terpetakan dan disepakati ini meliputi batas Desa Pasir Kulon, Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Lor, Desa Karanggude Kulon, dan Desa Jipang. Dalam Penetapan batas ini Kelurahan Pasir Kidul belum menetapkan batas wilayah sepenuhnya, oleh karena itu penelitian penetapan batas wilayah bertujuan untuk menetapkan titik dan garis yang menunjang dalam elemen batas wilayah.

Penerapan metode dalam kegiatan penetapan batas wilayah di Kelurahan Pasir Kidul ini menggunakan metode kartometrik. Metode ini memiliki peran penting dalam penetapan batas wilayah karena menggunakan teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) dan data spasial yang berkaitan dengan informasi geografis untuk menentukan batas wilayah. Alasan penerapan metode kartometrik dalam penetapan batas wilayah di Kelurahan Pasir Kidul ini terjadi keraguan setelah menelaah dokumen-dokumen terkait batas wilayah, dokumen tersebut dimulai dari peta dasar yang digunakan dalam pelacakan batas, ketidak sinkronan batas wilayah pada peta RBI dan berita acara yang telah disepakati sebelumnya bahwa segmen batas dan simpul 3 desa ini berada jauh dari wilayah Kelurahan Pasir Kidul.

Penerapan acuan dasar menggunakan Peta RBI yakni karena dalam peta RBI terdapat susunan layer garis batas wilayah desa, kecamatan, kabupaten, serta provinsi dan data topografi lainnya yang dapat dijadikan selaku referensi acuan dalam melakukan interpretasi daerah kajian. Dalam penelitian penetapan batas ini membutuhkan data citra resolusi tinggi pada daerah kajian. Data citra resolusi tinggi yang dimaksud bukanlah data hasil pemotretan menggunakan kamera metrik. Dalam pemutakhiran informasi batas wilayah Kelurahan Pasir Kidul ini dilaksanakan di atas citra dengan pemakaian wujud alam sebagai Batasan wilayah semacam: sungai, *watershed* (garis batas khayal yang diawali dari suatu puncak gunung serta menelusuri punggung bukit yang mengarah pada puncak gunung selanjutnya), danau dan pemakaian bentuk-bentuk Batasan buatan seperti jalan, jalur kereta api, serta saluran irigasi sesuai dengan Permendagri no 46 tahun 2016.

Penerapan metode ini dapat membantu dalam menyelesaikan kegiatan penetapan batas wilayah yang belum memiliki kejelasan terhadap batas wilayahnya khususnya

Devi Muhamad Ramdhan, 2023

PENETAPAN BATAS WILAYAH MENGGUNAKAN METODE KARTOMETRIK (STUDI KASUS DAERAH KELURAHAN PASIR KIDUL KECAMATAN PURWOKERTO BARAT, KABUPATEN BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH) Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Kelurahan Pasir Kidul. Metode kartometrik ini dapat memvisualisasi dan analisis informasi geografis seperti topografi, geologi, dan lainnya untuk membantu dalam pemetaan dan penetapan batas wilayah. Alat dan perangkat lunak SIG seperti *software* GIS membuat metode kartometrik lebih efisien dan akurat dalam memproses dan menganalisis data, sehingga hasil penetapan batas wilayah yang diterima lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.2 Rumusan Masalah

Terdapat rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang sudah di uraikan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana implementasi Permendagri no 45 tahun 2016 dalam penetapan batas wilayah di Kelurahan Pasir Kidul menggunakan metode kartometrik?
- 2) Bagaimana hasil dari penetapan batas wilayah terhadap Permendagri no 45 tahun 2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

- 1) Menganalisis dan ikut berpartisipasi dalam penetapan batas wilayah di Kelurahan Pasir Kidul Menggunakan Metode Kartometrik berdasarkan Permendagri no 45 tahun 2016
- 2) Mendapatkan hasil analisis dari penetapan batas wilayah berdasarkan pedoman Permendagri no 45 tahun 2016

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka ada beberapa hal yang dapat dipandang sebagai manfaat baik secara akademis maupun praktis, dengan mengangkat penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini memiliki manfaat teoritis, penelitian ini memaparkan manfaat dari penelitian yang sudah dilakukan, diantaranya:

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan membantu dalam mendeskripsikan penelitian hal lain yang memang korelasinya dengan penelitian ini.

Devi Muhamad Ramdhan, 2023

PENETAPAN BATAS WILAYAH MENGGUNAKAN METODE KARTOMETRIK (STUDI KASUS DAERAH KELURAHAN PASIR KIDUL KECAMATAN PURWOKERTO BARAT, KABUPATEN BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH) Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- 2) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang baik kepada pemerintah daerah terkait kebijakan dalam penataan ruang.
 - 3) Penelitian ini diharapkan menghasilkan data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kesepakatan teknis untuk mendukung pemerintahan kabupaten/kota dalam kegiatan penegasan batas desa/kelurahan.
2. Manfaat Praktis
- 1) Bagi Penulis
Penelitian ini bermanfaat dalam pengembangan pengetahuan dan kemampuan penulis dalam penetapan batas wilayah menggunakan metode kartometrik serta menganalisis suatu batas wilayah berdasarkan peraturan kemendagri dan hasil kesepakatan yang tertulis di atas berita acara.
 - 2) Bagi Peneliti selanjutnya
Penelitian dapat menjadi acuan bagi para peneliti selanjutnya, sehingga dapat dijadikan studi banding bagi mahasiswa atau pihak yang melakukan penelitian yang sejenis.
 - 3) Bagi Masyarakat
Penelitian ini sebagai bukti dan juga wawasan bagi masyarakat bahwa batas wilayah dari Kelurahan Pasir Kidul ini sudah ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara wilayah yang berbatasan.

1.5 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan definisi yang menjelaskan setiap variabel yang berhubungan dengan penelitian ini. Definisi operasional ini berfungsi untuk menyamakan penafsiran terhadap istilah-istilah yang ada dalam skripsi. Berikut merupakan definisi operasional yang sesuai dengan judul penelitian yaitu Penetapan Batas Wilayah Menggunakan Metode Kartometrik (studi kasus Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat).

- 1) Penetapan
Penetapan adalah tindakan sepihak menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus (KBBI, 2016a)
- 2) Batas

Devi Muhamad Ramdhan, 2023

PENETAPAN BATAS WILAYAH MENGGUNAKAN METODE KARTOMETRIK (STUDI KASUS DAERAH KELURAHAN PASIR KIDUL KECAMATAN PURWOKERTO BARAT, KABUPATEN BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH) Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan (Permendagri RI, 2016).

3) Wilayah

Wilayah adalah satu administrasi pada tingkat subnasional seperti satu propinsi, satu kabupaten atau lainnya (Kawad & Mura, 1979).

4) Metode Kartometrik

Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung (Permendagri RI, 2016).

1.6 Struktur Organisasi Skripsi

Bab 1 Pendahuluan. Merupakan uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, definisi operasional, struktur organisasi skripsi, serta penelitian terdahulu.

Bab 2 Kajian Pustaka. Menguraikan tentang teori – teori dan konsep tentang, batas wilayah, Metode Kartometrik, serta aplikasi sistem informasi Geografi (SIG) sehingga uraian tersebut berkaitan dengan masalah penelitian.

Bab 3 Metode Penelitian. Berisikan tentang metode penelitian, lokasi penelitian, waktu penelitian, tahapan pengumpulan data, serta teknik analisis data (FGD, pembuatan peta dasar, *overlay* data).

Bab 4 Hasil dan Pembahasan. Membahas mengenai pengolahan data hasil penelitian, serta pembahasan hasil penelitian berdasarkan teori dan peraturan dasar hukum yang digunakan.

Bab 5 Kesimpulan dan Saran. Berisikan kesimpulan penelitian dari hasil analisis data lapangan, kemudian saran yang dari hasil penelitian serta diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran – lampiran.

1.7 Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan proposal penelitian, diperlukan pengkajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian ini. Hal ini bertujuan

Devi Muhamad Ramdhan, 2023

PENETAPAN BATAS WILAYAH MENGGUNAKAN METODE KARTOMETRIK (STUDI KASUS DAERAH KELURAHAN PASIR KIDUL KECAMATAN PURWOKERTO BARAT, KABUPATEN BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH) Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

untuk menghindari adanya persamaan penelitian dan menentukan pembeda antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Berikut merupakan hasil penelitian terdahulu mengenai batas wilayah dengan menggunakan metode kartometrik.

Devi Muhamad Ramdhan, 2023

PENETAPAN BATAS WILAYAH MENGGUNAKAN METODE KARTOMETRIK (STUDI KASUS DAERAH KELURAHAN PASIR KIDUL KECAMATAN PURWOKERTO BARAT, KABUPATEN BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH) Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Tahun	Judul	Rumusan Masalah	Tujuan	Manfaat	Metode	Hasil
1	Bashit, N., Prasetyo, Y., Firdaus, H. S., & Amarrohman, F. J.	2019	Penetapan batas desa secara kartometrik menggunakan citra quickbird	Segala aspek batas wilayah memerlukan suatu ketentuan batas dalam lingkup kewenangan dalam penataan administrasi Dalam penelitian ini dasar pedoman penetapan batas menggunakan Permendagri no 76 tahun 2012 untuk menentukan batas	Mengetahui pentingnya penetapan dan penegasan batas wilayah yang di dasari dengan peraturan Permendagri no 76 tahun 2012 yang menyatakan penegasan batas wilayah secara kartometrik	Dari penelitian ini dapat mengetahui gambaran penetapan dan penegasan batas dengan menggunakan media citra quikbird dengan ketentuan pedoman Permendagri no 76 tahun 2012 dalam penarikan batas secara kartometrik	Penelitian ini megacu pada peraturan permendari No.76 Tahun 2012. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa penegasan batas wiyalah dapat ditentukan menggunakan metode kartometrik	Hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi dalam penetapan batas wilayah secara kartometrik dengan mengacu pada peraturan Permendagri dan penerapan peta citra resolusi tinggi yang membantu dalam kegiatan penelitian penetapan batas desa secara kartometrik.
2	Yuwono, Yanto Budisusanto, Zahratu Firdaus	2019	Analaisa Kronologis Permasalahan Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Donggala dan Kabupaten	Faktor penunjang penelitian ini berdasarkan kasus konflik batas wilayah dengan dasar acuan terhadap kajian otonomi daerah	Penelitian ini menganalisa kronologi konflik dengan berpedoman terhadap Permendagri no 76 tahun 2012	Dari penelitian ini bisa menjadi referensi dalam Analisa indentifikasi historical batas wilayah berdasarkan ketentuan hukum di daerah kajian dengan	Metode yang digunakan pada penelitian ini yakni studi litelatur historis data kabupaten serta observasi dalam <i>overlay</i> peta	Hasil dari analisa garis batas Kepmendagri No.52 Tahun 1991 menurut Permendagri No. 76 Tahun 2012 dan data historis, terdapat beberapa koreksi garis batas diantaranya pada wilayah Desa Martasari, Desa Kasoloang, Desa Randomayang, Desa Martajaya, Desa Sarjo, Desa Bambalamotu, Desa Plewali, Desa Malino,

Devi Muhamad Ramdhan, 2023

PENETAPAN BATAS WILAYAH MENGGUNAKAN METODE KARTOMETRIK (STUDI KASUS DAERAH KELURAHAN PASIR KIDUL KECAMATAN PURWOKERTO BARAT, KABUPATEN BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH) Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

			Mamuju Utara Dengan Menggunakan Metode Kartometrik dan Geospasial	pada dasarnya segala aspek data batas dilihat dari segi historis dengan dilakukan penetapan batas secara penarikan kartometris		pedoman penetapan batas secara kartometris berdasarkan ketentuan Permendagri no 76 tahun 2012		dan Desa Tikke. Dihasilkan analisa dari beberapa aspek permasalahan batas wilayah Kabupaten Donggala dan Kabupaten Mamuju Utara bahwa daerah sengketa atau Desa Ngovi berada pada Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi.
3	Aulia Imania Sukma, Bambang Sudarsono, Fauzi Janu A	2017	Verifikasi Penarikan Garis Batas Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Dan Kalimantan Timur Sesuai Dengan Permendagri No. 76 Tahun 2012 Menggunakan Metode Kartometrik	Menganalisis penetapan batas wilayah administrasi antara Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur dengan menggunakan metode kartometrik terhadap dokumen batas pada simpul batas serta penerapan cara mengetahui kondisi simpul penetapan batas wilayah administrasi	Penelitian ini ditujukan untuk Menganalisa rekonstruksi batas dengan metode kartometrik kartometrik dari permasalahan batas wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur berdasarkan	Manfaat dari penelitian ini mengetahui rekontruksi batas wilayah yang memberikan gambaran umum terhadap penarikan batas wilayah dari segi aspek teknis dan implementasi rekontruksi batas wilayah berdasarkan permendagri no 76 tahun 2012	Penelitian ini berpedoman pada Permendagri no 76 tahun 2012. Peletakkan titik simpul batas dan penarikan garis batas dilakukan dari segi aspek teknis dengan menggunakan metode kartometrik	Dalam penelitian ini menghasilkan gambaran terhadap verivikasi batas wilayah menggunakan metode kartometrik pada dasarnya penelitian ini mempunyai pedoman khusus pada peraturan permendagri no 76 tahun 2012. Dalam penerapan metode kartometrik ini dapat disimpulkan dalam penelitian ini kondisi dari segmen batas dan titik simpul batas yang di dasari dengan kesesuaian pada UU no 2 tahu 2013.

Devi Muhamad Ramdhan, 2023

PENETAPAN BATAS WILAYAH MENGGUNAKAN METODE KARTOMETRIK (STUDI KASUS DAERAH KELURAHAN PASIR KIDUL KECAMATAN PURWOKERTO BARAT, KABUPATEN BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH) Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

				Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur berdasarkan Permendagri No. 76 Tahun 2012 dari dokumen batas pada simpul batas	peraturan Permendagri no 76 tahun 2012			
4	Harwinda, Zulhilmi Bangkit	2016	Implementasi Permendagri No. 76/2012 Dalam Penentuan Batas Daerah Dengan Metode Kartometrik (Studi Kasus : Daerah Oloran Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Dan	Menentukan garis batas daerah antara Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo, terjadi pertambahan luas garis pantai menggunakan metode kartometrik berdasarkan Permendagri No. 76/2012 dan aspek historis daerah tersebut serta Bagaimana menyajikan visualisasi garis batas wilayah	Pada penelitian ini bertujuan untuk membuat peta alternatif garis batas daerah pertambahan garis pantai dengan menganalisa pta alternatif menggunakan metode kartometrik yang memaknai	Penelitian ini memberikan informasi terkait batas wilayah darat berdasarkan Permendagri no 76 tahu 2012 serta penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang penentuan batas wilayah laut dengan menggunakan metode kartometrik	Penelitian ini mengacu pada pedoman peraturan Permendagri nomor 76 tahun 2012 di tujukan untuk penentuan batas wilayah yang menerapkan metode karto metrik untuk kepentingan aspek penetapan penambahan garis batas darat dan laut.	Dari hasil penelitian ini adalah peta batas daerah pengelolaan dengan menggunakan prinsip equidistance dan median line sehingga didapatkan garis batas yang adil. Dalam penelitian ini terdapat tiga alternatif diantaranya, Alternatif batas wilayah berdasarkan Peta Batas Wilayah Tahun 2012, Alternatif batas wilayah berdasarkan Peta Rupa Bumi Indonesia, Alternatif batas wilayah berdasarkan Peta Batas Wilayah Tahun 1975.

Devi Muhamad Ramdhan, 2023

PENETAPAN BATAS WILAYAH MENGGUNAKAN METODE KARTOMETRIK (STUDI KASUS DAERAH KELURAHAN PASIR KIDUL KECAMATAN PURWOKERTO BARAT, KABUPATEN BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH) Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

			Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya).	tersebut dalam sebuah peta	implementasi permendagri no 76 tahun 2012 mengenai aspek historis			
5	Pande Restu Adikresna, Yanto Budisusanto	2014	Penentuan Batas Wilayah Dengan Menggunakan Metode Kartometrik (studi kasus daerah Kec.Gubeng dan Kec.Tambaksari)	Faktor penunjang keberlangsungan kegiatan penetapan batas wilayah berdasarkan kemendagri no 76 tahun 2012	Tujuan penelitian ini adalah menelusuri garis batas dan posisi titik titik koordinat serta mengidentifikasi cakupan wilayah pada peta atau citra yang sudah terkoreksi	Kebermanfaatan penelitian ini adalah dapat memberikan gambaran terhadap pengidentifikasian titik kartometrik dengan menggunakan peta kerja atau citra yang sudah terkoreksi	Penelitian ini mempunyai pedoman khusus terkait penentuan garis batas berdasarkan kemendagri no 76 tahun 2012, penelitian ini mengandalkan citra satelit yang sudah terkoreksi sehingga bisa dengan jelas mengidentifikasi titik, batas wilayah.	Dari penelitian ini menghasilkan gambaran terhadap penentuan batas wilayah menggunakan metode kartometrik pada dasarnya metode ini dapat menghasilkan suatu pengidentifikasian suatu segmen batas wilayah dengan menampilkan Panjang batas wilayah, Panjang batas alam dan batas buatan, status batas wilayah dan titik kartometrik batas wilayah. pada dasarnya elemen tersebut dijadikan analisis terhadap penelitian ini.
6	Endang	2019	Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Daerah dalam Perspektif Hukum dan	Faktor landasan pemicu pergantian Undang undang pemekaran daerah	Penelitian ini untuk mengkaji kedudukan garis batas yang telah ditetapkan	Penelitian ini dapat mengkaji kasus pada daerah pemekaran daerah yang perlu ditetapkan dan ditegaskan secara jelas	Metode yang digunakan yuridis empiris berdasarkan kasus-kasus sengketa batas pasca diterbitkannya UU-	Dalam hasil penelitian ini menjelaskan terkait Penetapan dan penegasan batas wilayah harus memenuhi unsur yuridis dan unsur teknis. Penetapan garis batas wilayah yang dilakukan di atas peta, yang tidak memiliki keterangan tentang sistem

Devi Muhamad Ramdhan, 2023

PENETAPAN BATAS WILAYAH MENGGUNAKAN METODE KARTOMETRIK (STUDI KASUS DAERAH KELURAHAN PASIR KIDUL KECAMATAN PURWOKERTO BARAT, KABUPATEN BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH) Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

			Informasi Geospasial		secara hukum kemudian direalisasikan dalam penegasan batas di lapangan, sehingga menimbulkan sengketa.		DOB. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis, empiris yaitu mengkaji masalah penetapan dan penegasan batas dari sisi hukum dan geospasial, realisasi aplikasinya yang tertera di dalam Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonomi Baru terhadap kasus-kasus sengketa perbatasan ketika dilakukan penegasan di lapangan.	koordinat, sistem proyeksi dan datum (model bumi yang digunakan) berpotensi terjadi sengketa. Garis batas administrasi yang ada di peta RBI bukan garis batas definitif, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai referensi yang pasti, tetapi hanya untuk pendekatan.
7	BilalMa'ruf Sumaryo, Gondang Riyadi. Kelmino Andwidono,	2009	PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH DESA	Faktor penunjang kegiatan Penetapan batas desa dilakukan melalui serangkaian tahapan penelitian dokumen batas,	Maksud dan tujuan penelitian ini menetapkan dan menegaskan batas desa agar tersedianya data	Manfaat dari penelitian ini memperlihatkan gambaran terhadap penetapan dan penegasan titik pilar batas wilayah dengan	Metode penelitian ini menggunakan dasar pedoman kemandagri no 26 tahun 2006 pada dasarnya penelitian ini di dasari	Dari hasil penelitian ini menggambarkan penetapan dan penegasan batas wilayah secara real time di lapangan dengan menggunakan alat GPS yang digunakan untuk mendapat titik koordinat yang menjadi acuan untuk penempatan pilar

Devi Muhamad Ramdhan, 2023

PENETAPAN BATAS WILAYAH MENGGUNAKAN METODE KARTOMETRIK (STUDI KASUS DAERAH KELURAHAN PASIR KIDUL KECAMATAN PURWOKERTO BARAT, KABUPATEN BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH) Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

	Wibowo		KAUMAN KECAMATAN KARANGREJO PROPINSI JAWA TIMUR	penentuan peta dasar, dan delineasi garis batas secara kartometrik di atas peta dasar	koordinat titik titik pilar batas dalam datum DGN'95 dan terciptanya peta hasil kesepakatan dari batas wilayah yang berbatasan	berpedoman pada kemendagri no 27 tahun 2006	dengan pengumpulan dokumen batas, pelacakan batas pengukuran batas di lapangan, deliniasi batas yang di tegaskan di lapangan pada titik pilar yang menjadi acuan batas wilayah	batas wilayah yang sesuai spesifikasi dengan kemendagri no 26 tahun 2006.
8	Bambang Riadi	2015	Implementasi Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 Dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Secara Kartometris	Faktor kegiatan dalam penetapan batas wilayah untuk menunjang kepastian hukum batas wilayah secara kartometris dengan implemetasi terhadap Permendagri no 76 tahun 2012	Penelitian ini ditujukan memberi kepastian hukum terhadap batas wilayah dengan mengacu pada ketentuan dan implementasi Permendagri no 76 tahun 2012 tentang penetapan dan	Manfaat dari penelitian ini memberikan referensi dasar terhadap ketentuan penetapan dan penegasan dalam penggambaran pelaksanaan penetapan dan penetapan secara kartometris yang mengacu pada Permendagri no 76 tahun 2012	Metodelogi pada penelitian ini memberikan gambaran penelitian yang berpedoman pada ketentuan Permendagri no 2012 tahun 2012 dalam pengkajian penetapan batas dan penegasan secara kartometris dengan melaksanakan tahapan adjudikasi sebagai kegiatan yang	Penelitian ini menjadi referensi terhadap kajian penetapan batas wilayah yang dilihat dari perkembangan teknologi yang memungkinkan kegiatan pemutakhiran data batas wilayah dilaksanakan dengan menggabungkan Teknik Penginderaan Jauh, Sistem Informasi Geografi dan Digital Elevation Model (DEM). Serta dari Penetapan dan penegasan batas desa dilaksanakan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas desa di wilayah darat.

Devi Muhamad Ramdhan, 2023

PENETAPAN BATAS WILAYAH MENGGUNAKAN METODE KARTOMETRIK (STUDI KASUS DAERAH KELURAHAN PASIR KIDUL KECAMATAN PURWOKERTO BARAT, KABUPATEN BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH) Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

					penegasan batas wilayah secara kartometris		dilaksanakan dalam rangka proses penetapan dan penegasan batas wilayah, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik (berupa peta) dan data yuridis (peraturan daerah) mengenai satu atau beberapa segmen batas.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

1.8 Analisis Penelitian Terdahulu

Berbagai referensi yang telah ditelaah untuk menjadi acuan penelitian, peneliti akan melakukan penelitian dengan tujuan yang serupa, yaitu melakukan penetapan batas wilayah dengan lingkup administrasi kelurahan. Perbedaan dari penelitian sebelumnya, penelitian ini melakukan pendekatan sosial dan menggunakan pendekatan secara yuridis baik dari peraturan daerah maupun dalam negeri.

Keterbaruan dalam penelitian ini yakni, melanjutkan tapal batas wilayah yang baru disepakati sebagaimana pada tahun 2021 dan melanjutkan penetapan segmen batas sehingga membentuk pola kesatuan batas yang kokoh dengan hasil kesepakatan di lapangan maupun digital. Data yang digunakan ini bersumber dari pemerintah daerah yang difasilitasi oleh Badan Informasi Geospasial.

Devi Muhamad Ramdhan, 2023

PENETAPAN BATAS WILAYAH MENGGUNAKAN METODE KARTOMETRIK (STUDI KASUS DAERAH KELURAHAN PASIR KIDUL KECAMATAN PURWOKERTO BARAT, KABUPATEN BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH) Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu